

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kolombia pada awalnya bukanlah negara yang kita lihat sekarang. Kolombia atau dengan nama resmi Republik Kolombia (spanyol: República de Colombia) memperingati kemerdekaan setiap tanggal 20 Juli dan merdeka pada tahun 1810. Dari tahun kemerdekaannya tersebut, pada 7 Agustus 1819, sang proklamator, Jenderal Simón Bolívar memukul mundur Spanyol dari kota Boyacá, yang berdampak pada pelepasan ikatan dengan Spanyol selaku kolonial dan membentuk Republik Kolombia Raya (spanyol: República de Gran Colombia).

Kolombia Raya kala itu makin berjaya hingga pada tahun 1822 ketika daerah Ekuador bergabung yang mana melengkapi daerahnya lainnya kala itu, yakni: Panamá dan Venezuela, yang sebelumnya bersama daerah Kolombia sendiri tergabung atas nama daerah koloni Spanyol yang bernama Granáda Baru (spanyol: Nueva Granáda). Kolombia Raya kala itu terbentuk dengan presiden pertamanya yakni Simón Bolívar dan wakilnya Francisco José de Paula Santander y Omaña. Namun negara Kolombia Raya (cukup besar jika kita melihat pada peta sekarang ini), hanya berumur pendek, hal ini dikarenakan perpecahan kubu diantara para pendiri yakni Bolívar dan Santander. Pendukung Bolívar melihat bagaimana negara seharusnya menetapkan pemerintah yang terpusat, bermitra dengan gereja Katolik Roma, serta memberlakukan perbudakan, sementara dari kubu Santander mendukung pemerintahan secara federal dan desentralisasi, serta mendukung bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya. Singkat cerita, Kolombia Raya pun pecah pada tahun 1830 ketika Ekuador dan Venezuela memutuskan untuk berpisah dan daerah yang tersisa membangun daerah sendiri.

Pada akhirnya, Kolombia resmi sendiri pada tahun 1850 dan terdapat dua partai yang terbentuk, Partai Konservatif (spanyol: Partido Conservador Colombiano/PCC) dan Partai Liberal (Partido Liberal/PL). Lalu pada 1886, nama

Kolombia pun resmi menjadi Republik Kolombia (spanyol: República de Colombia). (Library of Congress, 2007).

Kebijakan politik luar negeri Kolombia sejatinya berbasis pada tiga konteks teori teoritis: *respice polum* (melihat ke Utara), *respices similia* (melihat kepada yang serupa/yang lain) y *actuar en el mundo* (aktual terhadap dunia). Tiga teori tersebut sejatinya terkonstruksi dalam konteks sejarah yang berbeda, yang mana kala itu Kolombia menghadapi tantangan yang berbeda pada masa ke masa. Hal ini dimulai oleh doktrin dari Presiden Kolombia periode 1918-1921, Marco Fidel Suarez (atau dikenal sebagai Doktrin Suarez) yang terbentuk dalam konteks ketika Amerika Serikat yang semakin kuat kala kemenangannya di Perang Dunia I, Eropa yang hancur, serta daerah/negara yang berada di Timur yang tidak diketahui oleh Kolombia. Politik luar negeri ini berusaha untuk memunculkan Kolombia pada panggung internasional, lalu memulihkan hubungan dengan benua-benua lainnya yang mana kala itu juga ada kesenjangan setelah Panama memisahkan diri pada tahun 1903. Namun Doktrin ini sejatinya lebih menekankan kedekatan Kolombia kepada Amerika Serikat, di mana Kolombia mengikuti Doktrin Monroe pada zaman itu.

Konteks teori kedua, *respices similia* diinisiasikan oleh Menlu Kolombia Alfonso López Michelsen, pada masa pemerintahan Presiden Carlos Lleras Restrepo periode 1966 - 1970, yang menekankan pada melihat kepada negara-negara yang serupa dengan Kolombia dalam tingkat perkembangannya, lokasi geografisnya, hingga warisan sejarahnya. Menlu López menekankan pada relevansi yang diperlukan untuk diversifikasi hubungan dengan negara-negara tetangga Kolombia, untuk penyelarasan agenda domestik dan mengesampingkan hubungan dengan Amerika Serikat. Kolombia pada masa itu menentang International Monetary Fund dan Amerika Serikat yang memaksa Kolombia untuk mereformasi kebijakan finansialnya dengan devaluasi mata uang Peso dan kebijakan liberalisasi impor penuh (Galeano David, 2012, 15)

Konteks ketiga, *actuar en el mundo*, menekankan pada keterbukaan ekonomi yang mana merupakan gabungan dari dua basis sebelumnya. Tiga basis politik luar

negeri tersebut, juga dapat terlihat dari kebijakannya pada hal luar negeri oleh Presiden Juan Manuel Santos periode 2010 - 2018, yang pemerintahannya menyebutkan satu istilah yakni prinsip Kemakmuran Demokratis yang didasarkan pada tiga pilar: penciptaan lebih banyak lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lebih banyak keamanan. Politik luar negeri Kolombia tersebut yakni berfokus pada konsolidasi dan penguatan institusi dan pada kebijakan yang harus disesuaikan dengan laju perubahan yang digariskan dalam sistem internasional yang ada. Kolombia memosisikan capaian-capaian yang diperoleh sebagai tolok ukur internasional dalam perjuangan melawan masalah narkoba dunia, terorisme, penguatan kelembagaan dan komitmen dengan pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia. Kolombia berpartisipasi secara positif dalam forum internasional: Dewan Keamanan PBB yang digunakan untuk memosisikan kontribusi Kolombia dalam tujuan perdamaian dan keamanan internasional, serta, layaknya Indonesia, Kolombia aktif di Gerakan Non Blok yang mana cukup menegaskan netralitasnya di kancah internasional. Pedoman Kebijakan Luar Negeri Kolombia diproyeksikan dalam forum regional dan sub-regional, serta kepentingan Amerika Latin dan Karibia yang patut diperhitungkan.

Dalam fokusnya terhadap Asia Pasifik, Kolombia melakukan penguatan misi ekonomi, komersial, dan politik di Asia dan Pasifik. Kolombia menargetkan China, India, Turki, dan Rusia (Euroasia) sebagai sekutu tradisional yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan hubungan ekonomi, komersial, dan investasi untuk kepentingan pilar kemakmuran demokrasi, di mana dialog politik bilateral dan multilateral diperkuat dengan negara-negara di kawasan, meningkatkan kunjungan timbal balik tingkat tinggi di semua bidang, membuat mekanisme konsultasi politik dan komisi kerja sama lebih dinamis, berpartisipasi dalam acara internasional strategis.

Kolombia juga memperluas perwakilan diplomatik di negara dan lembaga yang dianggap relevan untuk perkembangannya, hal ini dilakukannya pada 2011, kedutaan dibuka di Turki, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Kolombia secara aktif

berpartisipasi dalam APEC (Asia Pacific Economic Cooperation Forum) dan juga ikut aktif dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh ASEAN (Asian Southeast Association of Nations). Negosiasi komersial dan agenda investasi juga dipromosikan Kolombia dengan komunitas negara-negara Teluk, Jepang, Rusia, dan Turki. Kolombia sendiri merupakan bagian dari kelompok ekonomi berkembang yang disebut CIVETS (Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan), serta Kolombia juga membangun ikatan ekonomi, politik, dan diplomatik dengan kelompok negara Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok (BRIC). Kolombia juga telah menjadi bagian dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), di mana Kolombia bersedia mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan kebijakan dan undang-undang publiknya dengan parameter OECD (Ministerio de Relaciones Exteriores, n.d.).

Tiga basis politik luar negeri Kolombia tersebut di atas juga masih terlihat pada kebijakan pemerintahan Presiden Kolombia terkini, Gustavo Petro, yang mana penekanannya ada di beberapa poin: Pertama, integrasi negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Hal ini dikatakan oleh Kolombia sesuai pada konstitusinya tahun 1991 yang menekankan pada integrasi, kerjasama, dan dialog dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dalam pengembangan strategi kolektif dalam berbagai bidang-bidang seperti perubahan iklim, pembangunan dan pemeliharaan perdamaian, sengketa wilayah, migrasi, perdagangan narkoba, keamanan, pengetahuan, budaya, produktivitas, dan perdagangan.

Dalam peristiwa pada tahun-tahun sebelumnya, Kolombia mengalami kerenggangan hubungannya dengan Venezuela, setelah pada tahun 2016-2018 lalu mengalami krisis politik yang menyebabkan banyaknya masyarakat Venezuela yang mengungsi ke Kolombia. Presiden Petro menegaskan dalam kebijakan luar negerinya agar lintas batas luar negeri antar Amerika Latin dan Karibia adalah milik bersama, sehingga diperlukan penyelesaian konflik agar tetap bersatunya Amerika Latin dalam menyelesaikan masalah-masalahnya ke depannya. Hal ini pun tidak hanya dengan Venezuela, namun juga dengan Kuba yang mengalami krisis ekonomi dan politik

serupa seperti Venezuela. Dalam konteks regional juga, Kolombia menekankan dialog dengan negara-negara UNASUR (Persatuan Negara-negara Amerika Selatan / *La Unión de Naciones Suramericanas*), di mana Kolombia harus mengatasi perbedaan ideologis yang mungkin muncul dan membantu mengkualifikasi keberpihakan yang tidak kritis.

Kedua, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kolombia menyatakan bahwa kebijakan negaranya akan dimulai dari pengakuan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan, saling terkait dan saling bergantung, yang berarti akan diberikan penghormatannya dan jaminan, tanpa diskriminasi, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini juga termasuk dari penerapan Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan kelompok pemberontak saat itu, FARC yang bersedia untuk menaruh senjatanya demi penghidupan yang lebih baik.

Ketiga, fokusnya terhadap perubahan iklim. Kolombia mengusulkan pembentukan front bagi Amerika untuk melawan perubahan iklim, mengatasi masalah mendasar seperti pemulihan ekologis hutan hujan Amazon dan bioremediasi ekosistem yang dirusak oleh model ekstraktif, serta target pengurangan 51% gas rumah kaca (GRK). Kolombia mencari dividen dari penyerapan karbon, kompensasi untuk menjaga cadangan batu bara dan minyak bumi, dan memungut pajak atas produk dan layanan intensif karbon. Kolombia juga mengusulkan pembentukan pengadilan iklim dunia untuk menyelesaikan dan menghukum aktor besar yang bertanggung jawab atas bencana lingkungan di dunia, serta akan memperluas kawasan lindung benua dan laut sesuai dengan strategi 30x30 yang berupaya melindungi 30% ekosistem darat dan laut pada tahun 2030 di seluruh dunia dalam kerangka yang disebut "dekade restorasi".

Presiden Petro dan pemerintahannya akan memproses ratifikasi Perjanjian Escazú oleh Kongres Republik Kolombia, serta menetapkan tujuan ambisius yang berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati dalam kerangka ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan pembaruannya, mengadopsi langkah-langkah

efektif terhadap hilangnya keanekaragaman hayati karena perluasan perbatasan pertanian dan eksploitasi ekonomi. Kolombia akan menjadi pemimpin dunia dalam bioekonomi dan bioprospeksi yang, bersama dengan kebijakan sains, inovasi, dan teknologi yang kuat, akan meningkatkan kekayaan intelektual dan alam negara kita, dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Nasional (NDC) 2020-2030 melalui implementasi Perjanjian Perdamaian, dan jaminan hak asasi manusia dengan partisipasi perempuan dan etnis serta komunitas rentan, antara lain.

Keempat, kebijakan luar negeri tentang kontra obat-obat terlarang. Pemerintahan Presiden Petro secara tertulis akan mengakomodir pelegalan penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi, sesuai dengan perkembangan negara-negara lain dan permintaan global. Namun dalam hal narkoba jenis kokain, Kolombia menekankan pada mekanisme multilateral, dengan mencari aliansi dengan negara-negara yang berkomitmen untuk memperkuat penelitian interdisipliner dan pengembangan tanggapan alternatif berdasarkan bukti melawan kompleksitas masalah kokain. Dalam hal kokain tersebut, Pemerintah Kolombia berfokus pada pengembangan komoditas lain pengganti pengembangan tanaman koka yang subur.

Kelima, kebijakan mengenai perdagangan dan investasi. Adapun Pemerintahan Presiden Petro menetapkan target mengenai hal ini:

- Mendorong ekspor energi non-tambang secara terartikulasi dengan model pengembangan industri;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dalam proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi bilateral;
- Meninjau efek dari proses liberalisasi unilateral dan bilateral (pengurangan tarif) untuk menetapkan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan menurut aturan Organisasi Perdagangan Dunia dan ketentuan perjanjian perdagangan bebas;

- Berpartisipasi secara aktif dalam diskusi tentang kekayaan intelektual di dalam Organisasi Perdagangan Dunia, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan, dan berpartisipasi dalam forum yang membahas hubungan antara kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, dan transfer teknologi.
- Berpartisipasi dalam diskusi dalam kerangka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang promosi kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia.
- Memperkuat proses dan hubungan integrasi Amerika Latin dengan Asia Pasifik;
- Meningkatkan peringkat risiko negara dan menarik investasi asing yang mempromosikan model pembangunan berkelanjutan, transfer teknologi, dan penguatan sektor-sektor utama seperti energi bersih, agribisnis, produk bernilai tambah tinggi, pariwisata, infrastruktur, dan teknologi informasi, dan telekomunikasi;
- Memastikan kerangka peraturan untuk investasi asing yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, penggunaan royalti yang tepat, perlindungan Hak Asasi Manusia dan lingkungan;
- Meninjau karakteristik perselisihan dalam kerangka perjanjian investasi bilateral dan putusan arbitrase untuk menetapkan langkah-langkah pencegahan, penyesuaian, dan harmonisasi kebijakan investasi dan strategi pembangunan.
- Mempromosikan diskusi global tentang Hak Asasi Manusia dan peran perusahaan multinasional serta aktivitasnya, serta penerapannya di negara tersebut.

Keenam, kebijakan mengenai migrasi. Kebijakan ini akan dirumuskan oleh Pemerintahan Presiden Petro, seperti yang telah disebutkan secara umum pada poin pertama, mengenai imigran Venezuela yang telah datang ke Kolombia yang jumlahnya sudah hampir dua juta orang. Walaupun tidak pernah ada rencana deportasi bagi orang-orang Venezuela tersebut, namun dampaknya cukup buruk,

mengingat yang masuk ke Kolombia juga termasuk orang-orang dengan kejahatan seperti merampok, mencuri, dan pembunuhan tak terencana. Namun disebutkan juga bahwa Kolombia, pada pemerintahan Presiden Ivan Duque, sudah menjadi contoh global dalam pemberdayaan imigran Venezuela (Petro, 2022).

Secara regional, melihat pada poin pertama kebijakan luar negeri Presiden Petro, Kolombia berusaha untuk mengintegrasikan kembali negara-negara Amerika Selatan yang terfragmentasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Menggabungkan kekuatan Kolombia dengan negara-negara yang cenderung kiri seperti Meksiko, Argentina, Chile, dan Brazil merupakan kunci Kolombia untuk pengintegrasian negara-negara di benua tersebut. Pada Oktober 2022 dalam forum negara-negara Amerika (Foro de las Américas), Kolombia menyerukan agar Kuba, Nicaragua, dan Venezuela untuk hadir bersama anggota forum tersebut. Kementerian Luar Negeri Kolombia pun juga menegaskan agar Venezuela dan Nikaragua untuk dimasukkan ke dalam *Organization of American States*. Namun, Kolombia juga memiliki rintangan pada perbatasan seperti pada poin pertama kebijakan luar negeri Presiden Petro tersebut, yakni di antaranya adalah ‘invasi’ yang masih dilakukan kelompok separatis *The National Liberation Army* (ELN), Kelompok Revolusi Bersenjata Kolombia (FARC) hingga kelompok *Nueva Marquetalia* yang terafiliasi dengan kartel Meksiko seperti Sinaloa (Petro Y América Latina: Un Catálogo De Buenas Intenciones, 2023).

#### *Hubungan Diplomatik Kolombia dan Indonesia*

Jika kita tarik lebih ke belakang lagi, hubungan diplomatik Kolombia dan Indonesia secara resmi dimulai sejak tanggal 15 September 1980 yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Communiqué* di kota Jenewa, Swiss oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia kala itu, Atmono Suryo dan Duta Besar Kolombia untuk Italia, Jaramillo. Kolombia pertama kali membuka kedutaan di Jakarta pada tahun 1983, lalu dilanjutkan dengan Indonesia yang membuka Kedutaan di kota Bogotá, Kolombia pada tahun 1989. Dari 1980 tersebut hingga kedua negara

membuka kedutaan di negara masing-masing, Indonesia melaksanakan hubungan diplomatik dari kedutaannya di Brazil, sedangkan Kolombia melaksanakannya di India. Namun pada perjalanannya, dengan alasan efisiensi anggaran, Kolombia menutup kedutaannya di Jakarta dan mengembalikannya ke kedutaannya di India, sedangkan Indonesia tetap membuka kedutaannya di Bogotá. Hingga pada 28 Oktober 2011, Kolombia kembali membuka kedutaannya di Jakarta (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota D.C, Republik Kolombia, 2018).

Asal muasal ide dari tesis ini adalah berasal dari pengalaman empiris penulis yang bekerja di Kedutaan Kolombia di Indonesia. Dalam rentang tiga tahun penulis bekerja di Kedutaan Kolombia di Indonesia sendiri atau sejak Februari 2020, penulis mengalami beberapa peristiwa yang cukup tidak menyenangkan. Beberapa peristiwa tersebut seperti menemukan beberapa tempat, setidaknya di Jakarta dan Bali, yang menamakan dirinya dengan referensi-referensi budaya pop yang tidak disukai oleh Kedutaan Kolombia, seperti penamaan Pablo Escobar sebagai ikon budaya pop, layaknya Che Guevara atau Bob Marley. Setidaknya ada dua tempat yang memakai nama tersebut, yang mana tidak lama setelah temuan tersebut, Kedutaan Kolombia pun melayangkan nota protes terhadap dua tempat tersebut. Salah satunya sebuah bar di Bali yang bersedia mengganti penggunaan nama dengan menghindari nama Pablo Escobar setelah Kedutaan Kolombia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Pejabat Kedutaan pun tidak terhindarkan dengan mendapatkan obrolan-obrolan tidak mengenakkan bagaimana topik pembicaraan seputar pada Pablo Escobar, kartel narkoba, hingga masalah-masalah internal negara Kolombia lainnya.

Tidak hanya mengenai dua tempat tersebut, Kedutaan juga sering kali mengalami bias pengertian dari beberapa pejabat pemerintah Indonesia yang seringkali tertukar antara Meksiko dan Kolombia seperti Duta Besar Kolombia yang disangka juga menjabat sebagai Duta Besar negara Meksiko. Beberapa pejabat lainnya juga seringkali merasa seram dengan citra Kolombia yang masih banyak

kartel narkoba hingga pemberontak yang masih hinggap di negara tersebut. Hal ini juga yang menghambat agenda-agenda politik luar negeri, budaya, hingga perdagangan Kedutaan terhambat akibat dari citra-citra yang menempel pada benak pejabat Pemerintah Indonesia. Dari sisi pribadi penulis, beberapa kawan dan kerabat penulis selalu menginterpretasikan dirinya bekerja untuk perwakilan negara yang selalu disandingkan dengan narkoba dan hal tidak mengenakan lainnya.

Namun tidak hanya mengenai narkoba, beberapa kawan, kerabat, dan orang lainnya pun menginterpretasikan Kolombia dengan hal lain yang kurang lebih cukup positif, yang mana secara kasar, penulis melihat bahwa masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga golongan dalam melihat Kolombia:

1. Bagi kalangan bisnis, Kolombia adalah negara kopi. Hal ini dialami penulis pada keikutsertaannya dalam beberapa pertemuan Kedutaan dengan beberapa pimpinan perusahaan swasta Indonesia hingga BUMN, yang beberapa di antaranya mengatakan bahwa Kolombia sangat unggul pada komoditi kopinya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa tidak terlalu mengetahui potensi atau dapat membayangkan Kolombia secara utuh secara ekonominya.
2. Kolombia sebagai negara sepakbola. Keikutsertaan Kolombia secara reguler dalam ajang Piala Dunia FIFA serta kehadiran beberapa pemain bintang Kolombia pada ajang liga-liga negara Eropa membuat banyak dari kawan, kerabat, rekan dan *counterpart* penulis yang melihat Kolombia adalah negara yang cukup unggul dalam sepakbola, hingga bahkan diantaranya merupakan penggemar dari beberapa pemainnya.
3. Kolombia sebagai negara ‘produsen’ narkoba. Ini adalah hal serius yang cukup menyinggung dan sensitif bagi penulis. Banyak dari kawan, kerabat dan orang lain dari penulis yang sering melihat Kolombia sebagai negara narkoba, atau negara yang masih banyak akan kartel-kartel narkoba. Banyak diantaranya yang sering

mereferensikan pengetahuan mereka tersebut dari *platform* film Netflix, yang menayangkan film serial Narcos di *season* pertama.

Masyarakat Indonesia, menurut penulis juga masih cukup bias akan Kolombia dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, dalam hal ini sering tertukarnya antara Kolombia dengan Meksiko seperti hal di atas, Kolombia dengan tetangganya, Ekuador, Peru, hingga Venezuela. Hal ini cukup serius bagi Kedutaan Kolombia sendiri, mengingat bagaimana negaranya selalu direferensikan sebagai negara yang ‘bukan seperti itu’ serta dapat menghambat misi diplomatik Kedutaan di Indonesia. Beberapa hal tersebutlah yang memotivasi penulis dalam membuat tesis ini, sebagaimana penulis akan menjabarkan citra Kolombia di Indonesia secara ilmiah.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Melihat bagaimana latar belakang masalah di atas, di sini terumuskan dua masalah yang memang menjadi fokus dari penelitian dalam tesis ini. Dua permasalahan penelitian yang difokuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana geopolitik Kolombia terhadap kawasan Amerika Selatan?
2. Bagaimana Kolombia sebagai pemain utama di Amerika Selatan untuk berkontribusi terhadap Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini: Pertama, bagaimana Kolombia sebagai salah satu pengaruh di Amerika Selatan. Kedua, bagaimana Kolombia dapat membawa Amerika Selatan dalam kontribusinya terhadap kerjasamanya dengan Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah mengasah bagaimana Kolombia memberikan pengaruhnya secara geopolitik di benua Amerika Selatan. Hal ini melihat bagaimana Kolombia tergabung dalam beberapa organisasi regional, seperti yang saat ini Aliansi

Pasifik (*Pacific Alliance/Alianza del Pacifico*) ataupun yang sedang non-aktif seperti UNASUR (*Unión de Naciones Suramericanas/Union of South American Nations*), di mana menurut penulis, pengaruh Kolombia ini sudah berjalan cukup lama walau mulai tahun 2022, ada sedikit *twist* dari Presiden yang baru terpilih, Gustavo Petro. Kolombia adalah negara yang cukup berkiblat ke barat atau lebih beraliran liberal, namun presiden yang baru menjabat ini merupakan presiden yang beraliran kiri atau berideologi sosialis.

### **1.5. Kerangka Penulisan**

Penulisan ini akan berawal dari bab pertama yang menceritakan bagaimana negara Kolombia terbentuk, hingga hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Lalu pada bab kedua, akan dijelaskan kerangka berpikir berupa tinjauan pustaka bagaimana adanya kajian-kajian serupa mengenai Kolombia di negara lain. Adapun pada bagian kerangka teori, penulis menggunakan teori dasar hubungan internasional Liberalisme, lalu diikuti dengan teori Kebijakan Luar Negeri. Pada bab ketiga, metodologi yang akan digunakan penulis adalah kualitatif, yang berkonsentrasi pada pengumpulan data secara sekunder. Pada bab empat, penulis akan menjabarkan Kolombia di benua Amerika Selatan dan geopolitiknya. Bab kelima akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan tesis.